

## KPK Sita Rp1,5 M dari Staf PD Terkait Korupsi Ricky Pagawak

JAKARTA (IM) - Penyidik KPK memeriksa Reyhan Khalifa terkait kasus korupsi Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Reyhan Khalifa merupakan staf di DPP Partai Demokrat.

Reyhan Khalifa diperiksa pada Selasa (23/5). Penyidik KPK mencecernya tentang aliran uang dari pusran kasus korupsi Ricky Pagawak.

"Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi tersebut antara lain terkait dengan dugaan aliran uang tersangka RHP ke beberapa pihak," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (25/5).

KPK juga uang miliaran rupiah dari Reyhan Khalifa, yang merupakan staf parpol tempat Ricky Ham Pagawak bernaung. Ia juga dikenal sebagai pengusaha.

KPK sedianya juga memeriksa presenter televisi Brigita Manohara pada Rabu (24/5). Namun Brigita berhalangan hadir. KPK bakal kembali menjadwalkan pemeriksaan kepada Brigita

Manohara pekan depan. "Saksi tidak hadir dan konfirmasi kepada tim penyidik untuk dijadwal ulang pekan depan. KPK ingatkan untuk kooperatif hadir sebagaimana komitmen yang disampaikan yang bersangkutan," tutur Ali.

Ricky Pagawak ditangkap di rumah persembunyiannya yang berada di Abepura, Jayapura, pada Minggu (19/2). Ricky sebelumnya sempat jadi buron sejak Juli 2022 setelah kabur ke Papua Nugini.

Jejak Ricky di wilayah Indonesia mulai terlacak oleh penyidik KPK sejak Januari 2023. Ricky Pagawak diduga keluar masuk Indonesia-Papua Nugini melalui jalan tikus.

KPK kini telah menahan Ricky Ham Pagawak atas dugaan kasus suap. KPK menyebut Ricky diduga menikmati uang suap, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total Rp 200 miliar. ● me

## PPP: Masih Ada Kemungkinan Golkar dan PAN Dukung Ganjar

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut ada kemungkinan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, hingga saat ini Partai Golkar dan PAN masih terus melakukan komunikasi dengan Ganjar Pranowo dan PDI-P selaku partai asal Gubernur Jawa Tengah tersebut.

"Tapi kan masih ada kemungkinan sama (dukungan calon) juga, karena kan baik Partai Golkar dan juga PAN masih terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan katakana Pak Ganjar dan PDI-P. Ya nanti kita tunggu lah, kita lihat (keputusannya)," kata

Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

Asrul mengatakan bahwa keputusan dukungan capres akan menentukan nasib Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurutnya, PPP kini telah bekerja sama politik dengan PDI-P mengukung Ganjar. Tetapi, dua rekan partai di KIB, yaitu Golkar dan PAN belum menentukan pilihan.

"PPP kan sudah memutuskan untuk mengukung Pak Ganjar. Dengan demikian, berarti berkoalisi atau bekerja sama dengan PDI Perjuangan," ujarnya.

"Nah, Golkar dan PAN sedang dalam proses mengambil keputusan. Apakah keputusannya sama atau tidak sama (dukungan calon), itu yang nanti akan menentukan status KIB," katanya. ● me

## KPU Diminta Ikuti Putusan MK soal Syarat Eks Terpidana Boleh Nyaleg

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengikuti ketentuan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak politik mantan terpidana yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, putusan MK itu menyatakan, terpidana baru bisa mendapatkan hak politiknya lagi setelah lima tahun selesai menjalani masa pidananya atau bebas murni.

"Dalam penentuan syarat pencalonan anggota legislatif sudah seharusnya penyelenggara pemilu ikuti ketentuan norma sebagaimana putusan MK yang mensyaratkan bakal calon telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidananya," kata Ali kepada wartawan, Kamis (25/5).

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menduga KPU menyelundupkan pasal yang membuat mantan terpidana ancaman lima tahun penjara tidak ha-

rus menunggu lima tahun bebas murni untuk maju sebagai caleg. Ketentuan ini berlaku jika terpidana itu divonis majelis hakim dengan pidana tambahan pencabutan hak politik.

Meski istilah "terpidana" tidak spesifik sebagai pelaku korupsi, pasal itu tetap dinilai berisiko memudahkan koruptor untuk bisa maju sebagai caleg.

Menurut Ali, pidana tambahan seperti pencabutan hak politik menjadi sanksi yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera. Pidana tambahan tersebut membuat hak politik pelaku menjadi hilang sehingga haknya untuk memilih atau dipilih dicabut dalam waktu tertentu.

"Sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan," ujar Ali.

Ali mengatakan, selama ini KPK konsisten menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mencabut hak politik pelaku korupsi. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## MENTERI PUPR IKUTI PEMBEKALAN ANTIKORUPSI DI KPK

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kanan) didampingi Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/5). KPK melalui program PAKU Integritas memberikan pembekalan antikorupsi kepada jajaran di Kementerian PUPR untuk mencegah terjadinya praktik korupsi para penyelenggara negara.

# PBNU Tolak Politik Identitas, Gus Yahya: Berbahaya untuk Masyarakat

Muhammadiyah dan PBNU sepakat menolak politik identitas menjelang Pemilu 2024. Diharapkan Pemilu 2024 lebih bermartabat.

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menolak tegas adanya politik identitas jelang Pemilu 2024. Ia menyebut politik identitas merupakan kompetisi tanpa rasionalitas.

Seain itu, Gus Yahya - panggilan Yahya Cholil Staquf -- juga berpendapat bahwa politik identitas berbahaya bagi masyarakat luas. "Kami memandang politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan, karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/5).

petitor," ujarnya.

Ia dengan tegas menolak adanya politik identitas yang melibatkan organisasi PBNU. Terlebih politik identitas yang menjual agama Islam demi kepentingan pribadi, mencari simpatisan agar memperoleh suara di tahun politik nantinya. "Jadi kami tidak mau ada kompetitor pilih orang NU. Kita tidak mau itu, kalau mau bertarung harus dengan tawaran rasional, ini yang kami harapkan," katanya.

### Pemilu Bermartabat

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof H Haedar Nashir beserta jajaran bersilaturahmi ke Kantor PBNU, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/5).

Usai pertemuan, pimpinan kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini membuat pernyataan bersama. Dalam pernyataann bersama itu ditegaskan bahwa Muham-

madiyah dan PBNU sepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Gus Yahya menyebut bahwa kepemimpinan moral sangat diperlukan dalam politik agar para politisi tak hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan pragmatis.

"Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya tidak disetir dengan kepentingan-kepentingan pragmatis," kata Gus Yahya saat konferensi pers di lobi PBNU.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof H Haedar Nashir juga menegaskan, kepemimpinan moral diharapkan menjadikan Pemilu 2024 lebih bermartabat. Kepemimpinan moral itu akan melahirkan arah dan visi kebangsaan yang jelas sehingga kontestasi politik tak hanya berupa ajang mencapai kekuasaan semata.

"Tapi ada visi kebangsaan apa yang mau dibawa, diwujudkan yang berangkat dari fondasi yang diletakkan para pendiri bangsa," tutur Prof Haedar. ● han

## MK Kabulkan Gugatan Nurul Ghuftron, Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun

JAKARTA (IM) Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun.

Adapun gugatan dilayangkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghuftron terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Kamis (25/5).

Nurul Ghuftron menggugat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterima MK.

Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi masa jabatan pimpinan KPK tersebut dengan tiga alasan utama.

"Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo. Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK),

Dalam amar putusannya, Anwar Usman menyatakan sejumlah dalil utama terkait putusan persidangan. "Mengadili pertama mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," tegas Anwar Usman.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berakhir pada 20 Desember 2023.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghuftron meminta MK

mempertimbangkan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang mengatur tentang batasan usia minimal dan maksimal sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pasal 34 UU 30/2002 yang mengatur tentang masa jabatan Pimpinan KPK.

Ia mengaku telah diangkat memenuhi kualifikasi berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2022 (UU KPK pertama). Akan tetapi, dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) UU KPK telah mengurangi hak konstitusional Pemohon.

Berlakunya ketentuan pasal a quo yang semula mensyaratkan usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun, setelah perubahan menjadi paling rendah adalah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun mengakibatkan pemohon yang usianya belum mencapai 50 tahun tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan KPK untuk periode yang akan datang.

Hal ini disebutkan Nurul Ghuftron kontradiktif dengan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya telah dirugikan secara konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada masa jabatan selanjutnya.

Nurul Ghuftron meyakini bahwa aturan pembatasan usia minimal menduduki jabatan pemerintahan memiliki makna agar pemangku kepentingan terpilih tersebut adalah orang sudah memiliki kedewasaan.

Sehingga, menurutnya, orang yang telah berpengalaman dalam suatu jabatan harus pula dipandang "telah memenuhi syarat secara hukum" untuk memenuhi jabatan tersebut. ● han

## Tito Karnavian Mengungkap Ada 4 Sumber Senjata KKB

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sebut ada empat sumber senjata yang dimiliki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ia mengetahui sumber-sumber tersebut karena dirinya pernah menjabat Kapolda Papua selama dua tahun.

"Saya pernah jadi Kapolda di sana, setahu saya ada beberapa kasus tapi tidak banyak," kata Tito di Jakarta Utara, Kamis (25/5).

Tito menyebut, sumber pertama senjata KKB merupakan rampasan dari aparat TNI/Polri yang lengah, serta oknum yang menjual peluru. Kedua, senjata tersebut be-

rasal dari sisa konflik bersenjata di Ambon. Hal itu berdasarkan pengungkapan yang pernah dia lakukan.

"Saya pernah nangkap juga dulu, dari sisa konflik Ambon. Dulu kan ada konflik Ambon bersenjata kan, senjata itu banyak yang sudah selesai konflik, masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik," kata Tito.

Sedangkan sumber ketiga senjata yang dimiliki KKB adalah berasal dari Filipina Selatan. Tito menyebut, negara tersebut adalah negara bebas senjata dan memiliki industri rumahan (*home industry*) terkait senjata yang hasilnya cukup berkualitas.

"Mereka punya *home industry* banyak sekali yang kualitas bagus. Itu ada yang masuk lewat jalur laut, ada juga yang melalui jalur udara, kan ada pilot yang sudah ditangkap," beber Tito.

Terakhir, sumber keempat, yaitu senjata tersebut masuk dari jalur tikus lewat Papua Nugini. Namun, lanjut Tito, penyelundupan lewat jalur ini jumlahnya cukup kecil.

"Kasusnya kecil sekali, dari jalan tikus yang ada di Papua Nugini. Tapi itu bukan dari negaranya, bukan negara Papua Nugini, tapi elemen orang tertentu," jelas Tito. ● han

FOTO: ANT



## PERTEMUAN PBNU DAN PP MUHAMMADIYAH

Ketua umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (kedua kanan) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri), Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni (kanan), sekretaris umum PP Muhammadiyah Abdul Muti (kiri) memberikan keterangan pers, di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (25/5). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan membahas isu terkini yang terjadi di Indonesia.

### INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 30 Juni 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Kampus STTNAS

Kampus STTNAS, Jalan Babarsari No.1 Yogyakarta

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin Kantor Yogyakarta (0274) 513551 (Hunting)

Hormat Kami,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin